

## SINOPSIS

Bencana tsunami yang telah meluluh lantakkan sebahagian besar wilayah provinsi Nanggro Aceh Darussalam yang menelan korban harta benda maupun korban jiwa yang sangat besar, telah mengundang simpati masyarakat internasional untuk meringankan beban saudara-saudara mereka di bumi serambi mekkah. Disisi lain pemerintah pusat juga dengan sigap mendirikan sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan pembangunan Nanggro Aceh Darussalam pasca bencana. Sebuah lembaga yang bekerja dibawah kendali presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini diberi nama Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (BRR) yang bertugas selama empat tahun dan bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga ini mempunyai wewenang penuh terhadap seluruh aspek pembangunan diprovinsi tersebut. Dan yang paling penting adalah masyarakat Aceh sangat menaruh harapan besar terhadap kerja-kerja konkrit, dan mempunyai produktifitas yang maksimal terhadap pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang juga disebut-sebut sebagai dana takziah atas ratusan ribu nyawa yang telah menghadap sang khalik.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja lembaga yang hampir berumur dua tahun inipenulis memakai beberapa teori Negara dan Kebijakan untuk memudahkan dalam mengkaji sejauh mana Negara berperan dalam melindungi hak dasar warga negaranya. Dan juga mendeskripsikan tugas-tugas pokok BRR dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam memaparkan analisis ini penulis juga menggunakan teknik analisa kualitatif, yakni teknik yang mendasarkan pada kualitatif atau data yang merupakan wujud dari kata-kata tertulis dan pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data skunder yang diperoleh dari *dokumen-dokumen, buku-buku, internet*, dan hasil observasi langsung dilapangan yang bermanfaat untuk melengkapi informasi terhadap penelitian tentang efektifitas kinerja BRR. Sedangkan data primer didapat melalui wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang terlibat dan masyarakat korban bencana itu sendiri.

Sepanjang pembahasan dalam skripsi ini melalui analisa dapat dipahami antara lain: sejauh mana keseriusan BRR dalam menjalankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, apakah masyarakat korban bencana menjadi prioritas utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, apakah dana yang dikelola telah tepat sasaran dan mampu memenuhi hak kebutuhan dasar masyarakat, dan yang terpenting adalah sejauh mana kontrol pemerintah terhadap NGO/lembaga donor asing yang melakukan efektifitasnya di Aceh. Tidak dapat dipungkiri keberadaan NGO sangat membantu kemajuan proses pembangunan Aceh pasca tsunami. Namun yang menjadi catatan adalah sangat jelas terlihat bahwa latar kebudayaan yang berbeda sehingga cukup berpengaruh terhadap kelangsungan budaya local. Apalagi kita ketahui bahwa masyarakat Nanggro Aceh Darussalam yang mayoritas beragama islam yang notabene sangat bertolak belakang dengan kebudayaan westernisasi. Karna pemerintah harus sejak dini melihat persoalan ini, karena keadaan ini bisa saja menimbulkan konflik vertical maupun konflik horizontal.

Dari hasil analisa tersebut, kesimpulan yang dapat penulis berikan yaitu, lambannya kerja BRR dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terlepas dari mental para pejabat BRR yang korup dan kurangnya rasa empati terhadap masyarakat korban bencana, kondisi ini semakin diperparah dengan sikap para stsf dalam tubuh BRR sendiri yang hanya berorientasi kepada proyek dan cenderung memperkaya diri sendiri tanpa melihat kondisi masyarakat yang semakin terpuruk.